

KEBIJAKAN STABILISASI HARGA MINYAK GORENG

Oleh : Astari Wirastuti¹ dan Hamdani Surachman²

ABSTRACT

Generally, the retail price stability of cooking oil has decreased in the past two years. Cooking oil price shocks hit Indonesia from January 2000 up to December 2007 due to the increase of gasoline price and the fluctuation of CPO price in the international market. The result of this research shows that there are five variable which significantly influence the cooking oil price: CPO international price (in US Dollar), exchange rate, export tax, food crisis (dummy variable) and previous cooking oil price.

It is recommended that the Government of Indonesia (GOI) should only focus on the implementation of two policies : progressive export tax and subsidy for poor people. From the location aspect, GOI should focus its policies in Medan, Jakarta and Makasar. Medan and Jakarta suffers the most frequent price shocks, while Makasar suffers the highest price shocks.

A. PENDAHULUAN

Isu stabilisasi harga kebutuhan pangan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng hampir menjadi masalah rutin bagi masyarakat dan pemerintah. Instabilitas harga pangan pokok itu terjadi berulang hampir setiap tahun, terutama

menjelang hari raya, musim paceklik dan sebagainya. Berbagai kajian menunjukkan pentingnya stabilitas harga pangan seperti oleh Saddoulet Van Janvry (1995), Timmer (2003), dan Jayne (2004) menyatakan bahwa biaya sosial instabilitas pangan sangat tinggi. Instabilitas harga pangan dapat menurunkan tingkat efisiensi

¹ Peneliti Pertama pada Puslitbang Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Jl. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Telp. (021) 23528682 Email : email_tari@yahoo.com

² Kepala Bidang Usaha dan Lembaga Perdagangan Dalam Negeri pada Puslitbang Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan Jl. Ridwan Rais No. 5, Jakarta Telp. (021) 23528682
Email : hamdanisurachman@yahoo.com

penggunaan sumber daya dan dapat memicu gejolak makroekonomi dan politik (Newbery dan Stiglitz, 1981; Myers, 2006).

Di antara komoditas kebutuhan pokok, minyak goreng adalah salah satu produk turunan CPO yang mempunyai nilai strategis. Hal ini terjadi karena komoditas tersebut dikonsumsi oleh sebagian besar penduduk Indonesia yang berjumlah 220 juta. Harga minyak goreng meningkat tajam sebagai akibat kenaikan harga CPO di pasar internasional. Harga CPO di pasar Rotterdam sempat di atas US\$ 8500/ton, yang merupakan tingkat harga yang sangat tinggi. Sebagai akibatnya, harga minyak goreng eceran di pasar domestik sempat mencapai Rp 9000-10000/kg, padahal biasanya berkisar antara Rp 4500-6000 per kg (Susila, 2007). Lonjakan harga yang demikian tinggi tentu akan langsung berpengaruh pada pengeluaran rumah tangga dan dampaknya akan semakin signifikan untuk masyarakat miskin ataupun industri kecil yang banyak menggunakan minyak goreng. Kenaikan harga minyak goreng juga berkaitan langsung dengan inflasi, indikator ekonomi makro yang selalu diwaspadai semua pihak.

Oleh sebab itu, peran pemerintah untuk melakukan pengendalian merupakan suatu keharusan. Jika ini tidak dikendalikan, dampak kenaikan harga minyak goreng dapat berkembang tidak hanya terbatas pada isu ekonomi, tetapi merambat ke masalah sosial dan politik.

Pada komoditas minyak goreng, kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah adalah pemberlakuan *Domestic Market Obligation (DMO)*, pajak ekspor, operasi pasar untuk orang miskin, menanggung pajak penjualan (PPn) dan menerapkan larangan ekspor CPO. Melihat posisi strategis minyak goreng tersebut maka masalah stabilisasi harga minyak goreng menjadi hal yang penting, dan ini dijadikan tema utama penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Menentukan tingkat instabilitas harga minyak goreng,
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi instabilitas harga minyak goreng.

Betapapun telah dirancang secara seksama namun efektivitas kebijakan yang ditempuh selalu membutuhkan penyempurnaan. Selain terkait dengan dinamika lingkungan strategis, tuntutan penyempurnaan itu juga terkait dengan permasalahan berikut. Pertama, belum ada kesamaan pemahaman antar *stakeholder* mengenai instabilitas harga itu sendiri. Kedua, terkait dengan masih lemahnya infrastruktur pendukung implementasi kebijakan sehingga kebijakan yang ditempuh seringkali cenderung bersifat reaktif dan kurang antisipatif.

B. KERANGKA TEORI

Fluktuasi harga atau instabilitas sebenarnya dibutuhkan untuk mendorong realokasi sumberdaya dan realokasi

konsumsi ketika ada guncangan ekonomi. Namun untuk pangan, instabilitas harga yang berlebihan berpotensi memiliki dampak negatif yang cukup substansial. Merangkum dari hasil-hasil kajian Sadoulet Van Janvry (1995), Timmer (2003), dan Jordan *et al.* (2007), ada beberapa dampak negatif dari instabilitas harga pangan yang berlebihan :

1. Misalokasi sumberdaya dan inefisiensi ekonomi.
2. Instabilitas Ekonomi Makro.
3. Kemiskinan dan Kerentanan.
4. Instabilitas politik.

Instabilitas harga dapat diukur dengan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan trend harga. Instabilitas harga pangan dari data *time series* diukur melihat time trend harga dengan tahapan sebagai berikut:

Regresi menggunakan logaritma harga riil (p) sebagai variabel dependen dan waktu (t) sebagai variabel independen :

$$\ln p_t = a + bt + \varepsilon$$

dimana b = perkembangan bulanan harga riil.

Menghitung nilai / estimasi harga :

$$\hat{p}_t = e^{a+bt} \text{ dan residual relatif}$$

$$\hat{u}_t = (p - \hat{p}_t) / \hat{p}_t$$

Membuat indeks untuk melihat variabilitas

$$\text{harga } I(p) = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n \hat{u}_t^2}$$

2. Koefisien variasi. Salah satu ukuran yang paling sederhana yang dapat dipergunakan untuk melihat instabilitas adalah koefisien variasi (CV). Formulanya adalah :

$$cv = \frac{\text{StDev}}{\text{Mean}}$$

; untuk mempermudah membacanya kemudian dikalikan 100 (dalam persen)

StDev = standard deviasi

Mean = rata-rata

$$\text{StDev} = \sqrt{\frac{n\sum x^2 - (\sum x)^2}{n(n-1)}}$$

, sedangkan $\text{Mean} = \frac{\sum x}{n}$

Dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan intervensi, sebagaimana diusulkan oleh Sawit (2007) adalah dengan menggunakan metode *Moving Average* (MA) sebagai *trigger*. Ada 4 kemungkinan yang dapat dipakai sebagai dasar penentuan harga normal yaitu: (i) harga rata-rata tiga bulan terakhir, atau disebut *moving average* (MA) tiga bulanan (MA3)¹; (ii) harga rata-rata enam bulan terakhir atau disebut MA6, (iii) harga

¹ Sesuai dengan peraturan Mendag No.22/M-DAG/PER/10/2005 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Pengendalian Gejolak Harga

rata-rata 9 bulan terakhir, atau disebut dengan MA9; dan (iv) harga rata-rata 12 bulan terakhir, atau disebut dengan MA12. Harga normal tersebut yang menjadi harga referensi. Harga ini lebih dinamis mengikuti perkembangan harga pasar.

Semakin singkat harga rata-rata itu, semakin tinggi pula tingkat harga referensi manakala harga minyak goreng eceran terus merangkak naik. Ini menyebabkan, kenaikan harga minyak goreng eceran menjadi relatif rendah. Sebaliknya, bila tingkat harga rata-rata dalam periode yang lebih lama, seperti 9 atau 12 bulan, itu bisa digunakan untuk menangkap fenomena gejolak harga, karena harga referensi lebih stabil. Apabila harga minyak goreng di pasar konsumen (eceran) dalam waktu tertentu telah naik e" 25% dari salah satu kemungkinan (sebagai referensi), maka itu memenuhi syarat untuk intervensi pasar.

Disamping di atas, ada pula dua alternatif lainnya untuk menentukan kapan intervensi perlu dilakukan yaitu masing-masing (i) pola tradisional dengan penetapan harga langit-langit (HLL); dan (ii) menetapkan harga internasional sebagai tolok ukur intervensi. Untuk pendekatan HLL, pertama pemerintah menetapkan harga dasar (HPP) dan harga langit-langit. Harga dasar ditetapkan mengacu ke ongkos produksi dan penerimaan petani dari usaha tani padi. Sedangkan HLL ditetapkan x% di atas harga patokan/penerimaan petani (HPP).

Semakin rendah selisih HPP dengan HLL, semakin kecil insentif para pelaku pasar untuk mengais keuntungan, atau sebaliknya. Jika insentif itu kecil maka akan mendorong kejatuhan harga. Ini kurang baik untuk mendorong sektor UKM. Oleh karena itu, penentuan selisih harga HLL dan HPP haruslah ditetapkan pada tingkat yang wajar.

Ada banyak faktor penyebab instabilitas harga. Jayne (2004) secara global menyebutkan ada tiga sumber atau penyebab instabilitas, yaitu (i) guncangan pasokan di pasar domestik; (ii) perubahan kebijakan pemerintah; dan (iii) guncangan harga di pasar internasional. Selanjutnya, FAO (1986) mengidentifikasi sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi instabilisasi harga tingkat konsumen, yaitu (i) karakteristik produksi, (ii) selera konsumen, (iii) karakteristik perdagangan, (iv) partisipasi sektor swasta, (v) transportasi, (vi) waktu pemesanan barang, dan (vii) struktur badan / lembaga yang mengendalikan harga.

Produksi terkait dengan pola panen, jenis pangan dan intensitas tanam. Pengendalian harga pangan di daerah yang pola panennya meluas dan jenisnya banyak lebih mudah karena adanya pangan substitusi. Apalagi jika pola panennya tersebar sepanjang tahun, sehingga harga akan relatif stabil. Preferensi konsumen akan berpengaruh dalam menstabilkan harga. Makin banyak jenis dan ragam pangan substitusi, akan

saling menutupi konsumsi. Manakala harga pangan yang satu naik, akan cepat disubstitusikan dengan yang lain.

Partisipasi swasta amat terkait dengan insentif atau margin keuntungan dari aktivitasnya. Semakin besar margin itu, semakin tinggi pula keinginan mereka untuk ikut serta, termasuk pula perdagangan antar pulau. Partisipasi mereka akan menciptakan nilai tambah dari produksi pangan tersebut. Apabila insentif untuk itu berkurang atau tidak ada, maka peran swasta berkurang atau terhenti. Seharusnya peran pemerintah adalah merancang UU dan peraturan sehingga partisipasi swasta dalam perdagangan lebih banyak, tidak terkonsentrasi pada sedikit pelaku usaha. Perdagangan dalam negeri maupun impor, untuk sejumlah pangan pokok seperti minyak goreng, gula, kedelai dikuasai oleh sedikit importir/pedagang. Mereka mudah sekali mendorong instabilitas harga, karena mereka yang menguasai stok dan mengatur pasar pangan tertentu.

Ketersediaan alat angkut, baik di darat maupun di laut amat mempengaruhi efektivitas stabilisasi harga. Itu terkait dengan waktu dan ongkos untuk distribusi pangan. Alternatif transportasi yang sedikit dan ongkos yang mahal, akan menghambat penyaluran produk pangan ke daerah setempat. Hambatan tersebut menyebabkan instabilitas harga di suatu tempat semakin sulit diatasi. Kenaikan harga BBM yang berlebih dapat pula

membuat instabilitas harga di tempat-tempat tertentu.

Sebagai produk berbasis pertanian, maka fluktuasi harga minyak goreng tampaknya tidak akan dapat dihindarkan dan akan menjadi masalah rutin/kronis, baik ketika harga CPO menurun drastis ataupun meningkat tajam. Pada saat ini pemerintah menerapkan kebijakan Pungutan Ekspor (PE), kewajiban pasokan ke pasar dalam negeri atau yang disebut *Domestic Market Obligation* (DMO), dan melakukan operasi stabilisasi harga minyak goreng.

Jika pemerintah bermaksud mengatasi masalah tersebut secara jangka panjang, pemerintah harus mengambil kebijakan yang bersifat fundamental. Kebijakan tersebut memerlukan biaya yang cukup besar, namun diyakini mampu menyelesaikan masalah secara lebih mendasar dan jangka panjang. Biaya yang mahal tersebut akan terbayarkan jika masalah fluktuasi harga dan ketidakpastian kebijakan dapat ditekan seminimal mungkin. Hal ini akan menguntungkan baik bagi industri, konsumen, dan tentunya pemerintah. Jika pemerintah menerapkan kebijakan CPO dan minyak goreng secara jangka panjang, konsisten, dan transparan, maka pemerintah harus mempertimbangkan hal berikut.

Pertama, kebijakan yang dirumuskan sedapat mungkin mampu

mengakomodasi berbagai kemungkinan/skenario dimana intervensi pemerintah memang sangat dibutuhkan. Dalam kasus ini, tiga skenario yang perlu diantisipasi adalah harga CPO terlalu rendah, harga terlalu tinggi, atau perubahan nilai tukar yang cukup signifikan.

Kedua, target kebijakan harus lebih spesifik yaitu orang miskin, petani, atau industri yang berbasis CPO atau minyak goreng. Untuk orang miskin, misalnya, tujuan kebijakan adalah untuk memberi akses minyak goreng dengan harga terjangkau kepada mereka. Untuk petani dan industri, tujuan kebijakan pemerintah mungkin memberi dukungan agar petani menjadi kompetitif dan menciptakan kepastian iklim investasi karena industri CPO merupakan investasi jangka panjang.

Ketiga, tujuan kebijakan harus berdimensi jangka panjang sehingga tujuan tersebut memerlukan komitmen jangka panjang baik dari eksekutif maupun legislatif. Tanpa dukungan dan komitmen jangka panjang tersebut, kebijakan pemerintah akan cenderung bersifat jangka pendek untuk merespon isu jangka pendek.

Jika ketiga kriteria kebijakan tersebut sudah disepakati, maka ada beberapa pilihan kebijakan yang potensial untuk diterapkan dengan kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut :

Pungutan Ekspor, bersifat progresif (*variable levy*) seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.011/28/2008, kebijakan ini berdampak positif pembagian beban antara produsen, konsumen dan pemerintah yang seimbang, mudah dilaksanakan dan pemerintah mendapat tambahan pemasokan. Namun mempunyai sisi negatif yaitu menghambat upaya peningkatan ekspor, disinsentif bagi industri CPO domestik dan menurunkan pendapatan petani

Domestic Market Obligation, bila harga maksimum sudah terlampaui untuk periode tertentu, pemerintah mewajibkan produsen CPO dan minyak goreng untuk mengalokasikan produksinya pada harga tertentu untuk memenuhi konsumsi domestik dengan harga maksimum sama dengan harga eceran tertinggi (HET). Kebijakan ini relatif baik namun mempunyai sisi negatif yaitu : menghambat upaya peningkatan ekspor, menurunkan pendapatan industri CPO domestik, menurunkan pendapatan petani dan penerimaan negara lebih rendah serta sulit implementasinya.

Operasi Pasar, identik dengan kebijakan *buffer stock* tetapi lebih spesifik diarahkan untuk mencegah harga tidak melewati HET. Kebijakan ini tidak mendistorsi pasar ekspor, tidak membebani industri berbasis CPO dan tidak membebani petani, namun membebani

anggaran negara cukup besar dan efektivitasnya rendah

Subsidi ke Industri, misalnya dalam bentuk keringanan PPN-DTP ataupun subsidi harga CPO. Dengan demikian, biaya produksi menurun dan produsen minyak goreng diharapkan dapat menjual dengan harga tidak melewati HET. Positif kebijakan ini tidak mendistorsi pasar ekspor, tidak membebani industri berbasis CPO dan tidak membebani petani. Namun berdampak negatif seperti kesulitan implementasi, membebani anggaran negara cukup besar dan ekspor minyak goreng bersubsidi.

Subsidi ke Orang Miskin, menggunakan konsep direct payment pada orang miskin, hal ini sudah dilakukan baik di negara maju seperti Amerika Serikat (food stamp) dan di India (ration card) pada komoditi gula. Kebijakan ini positif karena tidak mendistorsi pasar ekspor, tidak membebani industri berbasis CPO, tidak membebani petanidan target t lebih fokus sehingga beban anggaran lebih rendah. Namun pelaksanaan sering tidak tepat sasaran karena data rumah tangga miskin yang tidak akurat dan membebani anggaran negara.

C. METODOLOGI

Ada dua tahap analisa yang dilakukan yaitu: (i) menentukan waktu yang tepat untuk mengintervensi pasar;

(ii) estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi harga tingkat konsumen (eceran).

Waktu yang tepat untuk melakukan diintervensi dicari dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Moving Average.

Menurut Sawit (2007), salah satu alternatif dalam menentukan instabilitas harga adalah dengan pendekatan *moving average* tiga bulan (MA3) enam bulan (MA6), sembilan bulan (MA9) dan dua belas bulan (MA12). Harga dinilai instabil atau perlu melakukan intervensi bila harga patokan (HP) melebihi harga *moving average* sebesar 25% , seperti dilihat dalam persamaan berikut;

- $HINTV \Rightarrow (HP - MA3)/MA3 * 100$
e" 25%; atau
- $HINTV \Rightarrow (HP - MA6)/MA6 * 100$
e" 25%; atau
- $HINTV \Rightarrow (HP - MA9)/MA9 * 100$
e" 25%; atau
- $HINTV \Rightarrow (HP - MA12)/MA12 * 100$ e" 25%.

2. Pendekatan harga langit-langit (HLL).

HLL ditetapkan 20%-25% di atas HPP yang didasarkan pada ongkos produksi. Harga dinilai tidak stabil bila harga diatas HLL sehingga pemerintah perlu melakukan intervensi.

- $HLL = (1 + 20\%) HPP$, atau
- $HLL = (1 + 25\%) HPP$

3. Mengikuti perkembangan harga dunia (World Bank, 2007).

Intervensi

pasar dilakukan secara otomatis apabila harga eceran telah melebihi 40% atau 50% di atas harga dunia.

- a. $HINTV = HE + 40\% * HI$
- b. $HINTV = HE + 50\% * HI$

Dimana :

- HE = harga eceran
- HI = harga internasional
- HINTV = harga intervensi
- HLL = Harga Langit-Langit
- HPP = Harga Pembelian Pemerintah

Dalam upaya untuk memahami harga tingkat konsumen atau harga eceran, akan digunakan regresi linear dengan tingkat stabilitas atau instabilitas sebagai variabel dependen. Dari berbagai referensi yang telah dipelajari, maka variabel-variabel independen yang diasumsikan mempengaruhi stabilitas atau instabilitas harga beras dan minyak goreng secara sederhana dapat dirumuskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$\Delta \text{Instab} = f (\Delta \text{WP}, \Delta \text{VM}, \Delta \text{STA}, \Delta \text{BBM}, \Delta \text{ER}, \Delta \text{HRV}, \Delta \text{P}_{-1}, \Delta \text{DS}, \text{KRISP}, \text{Kebijakan})$$

Dimana :

- ΔInstab = Instabilitas harga minyak goreng
- ΔWP = Perubahan harga CPO dunia
- ΔVM = Perubahan volume impor
- ΔSTA = Perubahan stok awal
- ΔBBM = Perubahan harga bahan bakar minyak

- ΔER = Perubahan kurs valas
- ΔHRV = Perubahan panen
- ΔP_{-1} = Perubahan dari harga pada periode sebelumnya
- ΔDS = Perubahan supply domestik
- KRISP = Krisis pangan
- Kebijakan = Kebijakan pemerintah

Dimana kebijakan-kebijakan yang dimaksud adalah :

1. Pajak ekspor
2. *Domestic Market Obligation* (DMO)
3. Subsidi
4. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN-DTP)

Bentuk akhir model yang diaplikasikan disesuaikan dengan data yang tersedia. Pengembangan model lebih lanjut untuk mengakomodasikan variabel-variabel yang dihipotesakan berpengaruh; seringkali sangat diperlukan. Sebaliknya, terdapat pula kemungkinan penyederhanaan model. Metode pendugaan yang akan digunakan adalah *metode regresi berganda*. Metode tersebut digunakan karena data sekunder yang digunakan dalam penelitian ternyata sudah bersifat stasioner.

D. TEMUAN KAJIAN

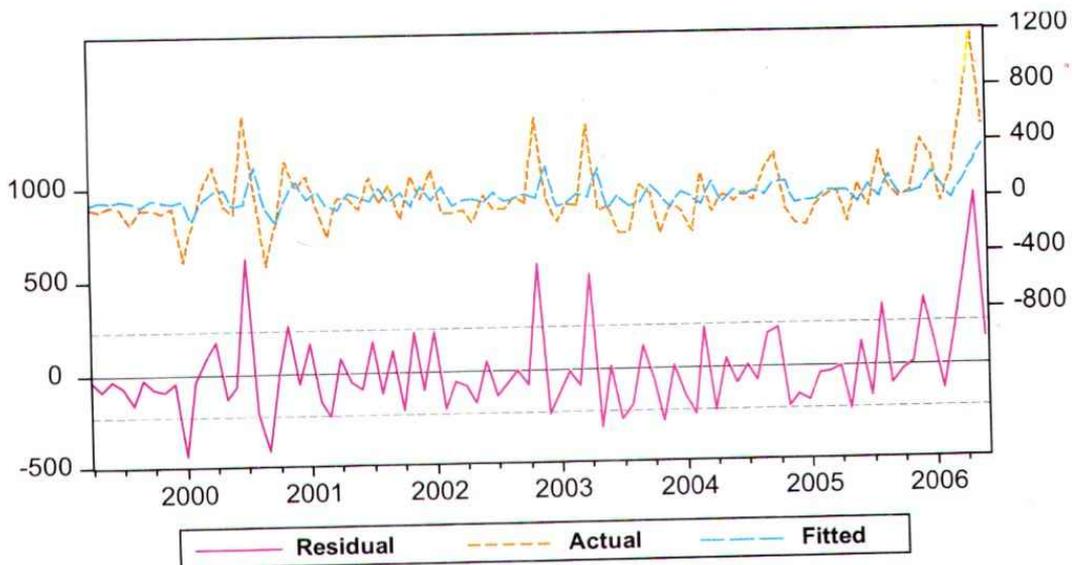
Ragam instabilitas minyak goreng juga konstan. Dengan demikian dalam uji instabilitas tidak perlu ditempuh dengan GARCH tetapi cukup dengan ARCH. Hasil analisis menunjukkan bahwa fenomena guncangan harga minyak goreng berbeda

dari beras. Selain frekuensi kejadiannya lebih banyak, besarnya pun relatif lebih ekstrim. Guncangan harga yang terjadi dalam periode Januari 2000 – 2007 dapat dipilah menjadi lima segmen waktu yaitu : (1) Periode 2000-2001 (awal): terjadi 3 kali guncangan harga; (2) Periode 2001-2003(awal) relatif stabil; (3) Periode 2003-2004 terjadi 2 kali guncangan harga; (4) Periode 2004-2006 relatif stabil dan (5) Periode 2007 terjadi banyak guncangan. Hal ini terkait dengan kenaikan BBM dan fluktuasi harga CPO di pasar internasional. (Gambar 1 dan Gambar 2)

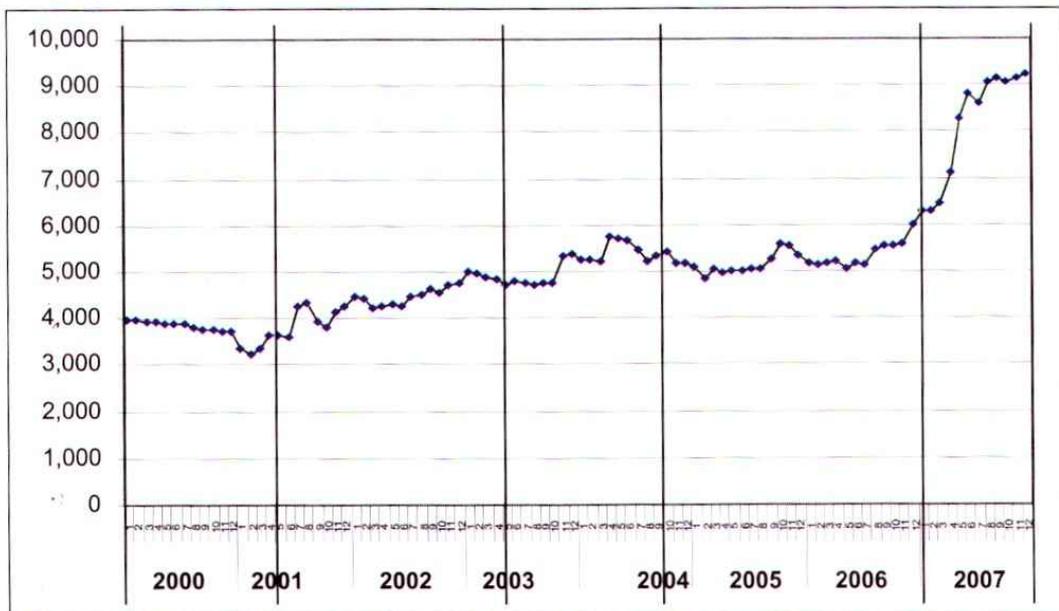
Di antara lima kota besar yang menjadi sampel penelitian ternyata Jakarta mengalami rata-rata harga bulanan yang tertinggi (lihat Gambar 1).

Selama periode waktu penelitian rata-rata harga minyak goreng melonjak tinggi di tahun 2007 di kelima kota besar.

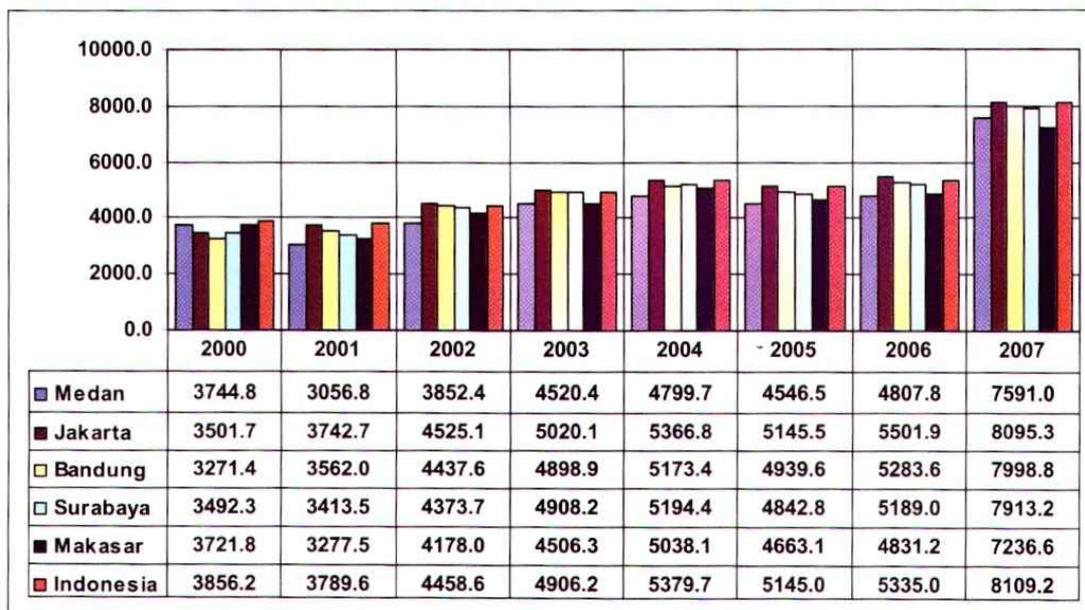
Di lihat dari pengolahan data primer ternyata harga minyak goreng bulanan cukup fluktuatif. Indeks stabilitas harga eceran minyak goreng bulanan untuk rata-rata Indonesia adalah 11.8 persen. Dalam periode 2000 – 2007, kondisi yang paling tidak stabil adalah tahun 2007 (koefisien variasi = 15 %) dan peringkat berikutnya adalah tahun 2001 (koefisien variasi = 10.2 persen). Kondisi demikian itu terjadi di hampir semua kota besar di Indonesia. Hal ini tampak dari fenomena yang terjadi di lima kota besar yang dijadikan sampel penelitian (Tabel 1).



Gambar 1
Instabilitas Harga Eceran Minyak Goreng Bulanan (Model ARIMA (2,1))



Gambar 2
Perkembangan Harga Bulanan Minyak Goreng di Tingkat Eceran



Gambar 3
Rata-rata Bulanan Harga Eceran Minyak Goreng di Lima Kota Besar Indonesia, Januari 2000 – Juni 2008

Tabel 1
Koefisien Variasi Bulanan dan Indeks Stabilitas Harga Eceran Minyak Goreng di
Beberapa Kota Besar Indonesia Tahun 2000 – 2007

	Koefisien variasi (dalam persen)								Ip (2000 – 2007) *)
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	
Medan	4.19	13.35	9.20	7.33	6.76	7.03	10.10	10.69	15.190
Jakarta	2.54	21.04	5.65	5.87	4.12	6.06	4.52	13.82	12.285
Bandung	1.85	14.50	6.03	5.95	7.96	6.18	9.05	10.58	12.166
Surabaya	6.03	14.59	6.68	7.85	6.53	5.66	9.60	12.12	13.223
Makasar	5.12	8.30	5.93	4.73	6.40	8.13	6.75	22.99	14.882
Indonesia	2.50	10.23	4.17	4.81	4.06	4.51	5.24	15.00	11.794

*) Ip = Indeks stabilitas (lihat Metode Penelitian)

Sumber : Badan Litbang Departemen Perdagangan (2008)

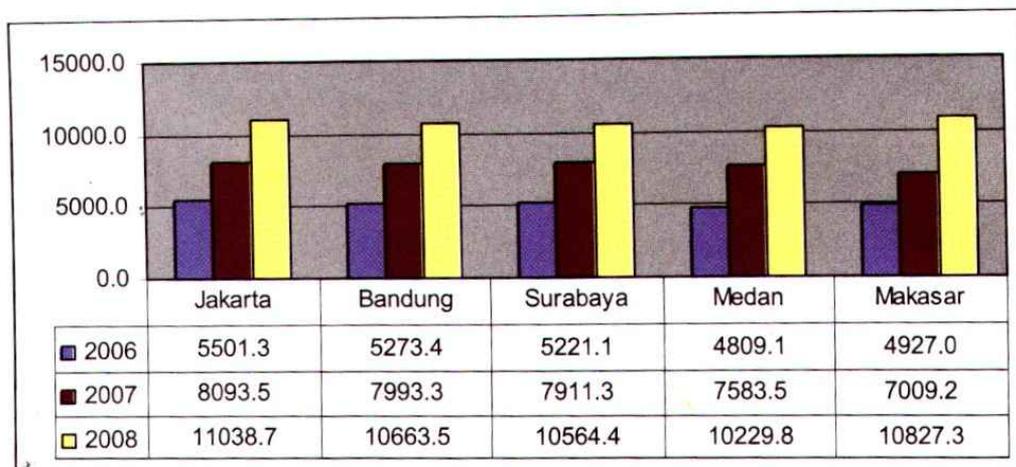
Di antara lima kota besar sampel penelitian, instabilitas tertinggi justru terjadi di Medan (indeks stabilitas = 15,2). Meskipun demikian rata-rata harga tahunannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan empat kota besar lainnya. Harga paling stabil adalah di Bandung (indeks stabilitas = 12,2), meskipun secara rata-rata harga tahunannya lebih tinggi daripada di Medan.

Untuk unit observasi mingguan selama periode Januari 2006 – Agustus 2008, hasil analisis disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 2. Meskipun harga minyak goreng di Jakarta lebih stabil daripada di Makasar tetapi rata-rata tingkat harganya lebih tinggi. Rata-rata harga mingguan pada tahun 2006, 2007 dan 2008 (sampai Agustus) di Jakarta adalah sekitar Rp. 5500/Kg, Rp. 8090/Kg, dan Rp. 1140/Kg (Gambar 2).

Tampak bahwa selama periode tersebut yang paling tak stabil adalah pada Tahun 2008. Antar kota besar, yang paling tak stabil adalah di Makasar, sedangkan yang paling stabil adalah di Jakarta (Tabel 2).

Dalam periode Januari 2000 – Desember 2007, untuk rata-rata Indonesia telah terjadi 16 kali insiden kenaikan harga di atas 5 persen. Frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 7 kali, dan peringkat berikutnya adalah pada tahun 2006 dan 2003 (masing-masing 3 kali).

Fenomenanya memang berbeda jika sumber-sumber keragamannya diperkecil dengan cara mempersempit cakupan wilayah kajian dengan memperlakukan kota sebagai unit analisis. Ternyata insiden lonjakan harga di atas 5 persen masing-masing kota tersebut lebih sering terjadi daripada di level agregat nasional (Tabel 3 dan Gambar 5).



Gambar 4
Rata-rata Mingguan Minyak Goreng tingkat konsumen (Rp/Kg)
di Lima Kota Besar, Januari 2006 – Agustus 2008.

Dalam kurun waktu Januari 2000 – Desember 2007, kenaikan harga eceran bulanan minyak goreng dengan besaran 5 persen ke atas (dibandingkan rata-rata tiga bulan sebelumnya) di Kota Medan terjadi 28 kali, sedangkan di Jakarta 24 kali. Di tiga kota lainnya (Bandung, Surabaya, dan Makasar) masing-masing adalah 20 kali. Meskipun dari sudut pandang

frekuensi kejadiannya yang tertinggi adalah di Makasar namun jika ditinjau dari tingkat kenaikannya, rekor tertinggi justru terjadi di Makasar yaitu 39 persen. Ini terjadi pada bulan April 2007. Meskipun dengan persentase yang lebih rendah, kenaikan harga tersebut masih terus terjadi sampai dua bulan berikutnya (Mei dan Juni).

Tabel 2
Indeks stabilitas harga minyak goreng mingguan dalam tiga tahun terakhir *).

Tahun *)	Jakarta	Bandung	Surabaya	Medan	Makasar	Indonesia
2006	7.376	6.292	5.159	7.512	13.268	8.199
2007	6.478	7.030	7.234	6.119	16.042	7.045
2008	9.266	11.738	13.451	12.369	14.755	10.158
2006 – 2008	7.594	8.246	8.666	8.581	14.729	8.348

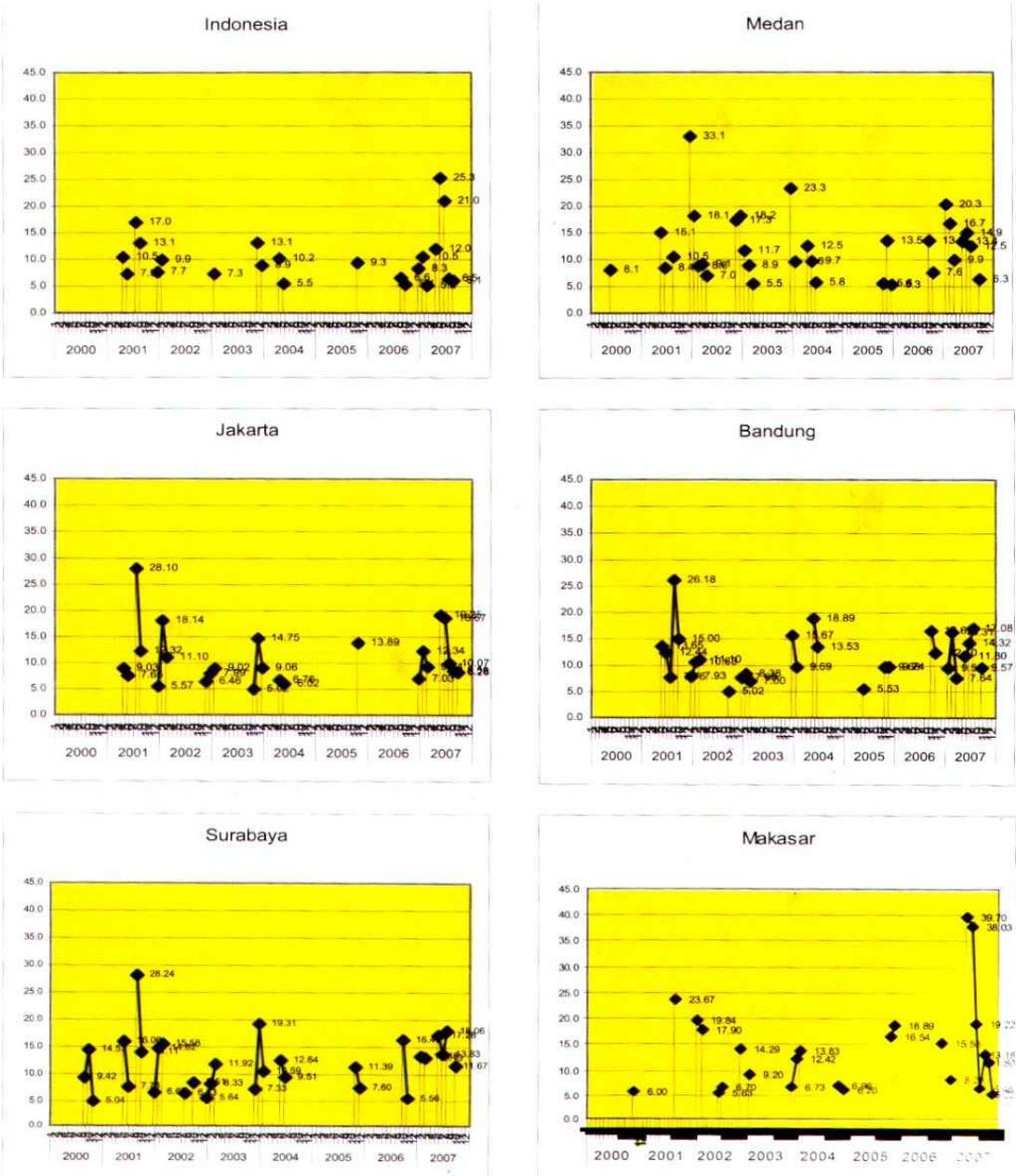
*) Januari 2006 – Agustus 2008

Sumber : Badan Litbang Departemen Perdagangan (2008)

Tabel 3
Insiden kenaikan harga eceran minyak goreng bulanan di atas 5 persen terhadap rata-rata bergerak tiga bulan sebelumnya di beberapa kota besar Indonesia selama periode Januari 2000 – Juni 2007.

Tahun	Wilayah	Wilayah												Frek.		
		Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec			
2000	Medan				8.1											1
2001	Medan				15.1	8.4		10.5					33.1	18.2		5
	Jakarta				9.0	7.7		28.1	12.3						5.6	5
2002	Medan			7.0								17.3	18.2	11.7		4
	Jakarta	18.1	11.1									6.5	8.0			4
	Bandung								5.0			7.7	8.4			3
	Surabaya						6.5					5.6	8.3			3
	Makasar						5.6	6.7								2
	Indonesia												14.3			1
2003	Medan	8.9	5.5									23.3	9.6			3
	Jakarta	9.0									5.0	14.8	9.1			4
	Bandung	7.0										15.7	9.7			3
	Surabaya	11.9									7.3	19.3	10.6			4
	Makasar	9.2										6.7	12.4			3
	Indonesia	7.3										13.1	8.9			3
2004	Medan			12.5		5.8										2
	Jakarta				6.8	6.0										2
	Bandung		18.9			13.5										2
	Surabaya		12.6			9.5										2
	Makasar	13.8	9.7													4
	Indonesia				10.2	5.5										2
2005	Medan										5.6	13.5	5.3			3
	Jakarta											13.9				1
	Bandung				5.5						9.7	9.7				3
	Surabaya										11.4	7.6				2
	Makasar											16.5	18.9			2
	Indonesia											9.4				1
2006	Medan									13.5	7.6				20.3	3
	Jakarta														7.0	1
	Bandung									16.6	12.4				9.5	3
	Surabaya									16.4	5.6				13.4	3
	Makasar											15.6			8.3	2
	Indonesia									6.6	5.4				8.3	3
2007	Medan	16.7	9.9		13.4	14.9	12.5			6.3						6
	Jakarta	12.3	9.3			19.3	18.7	10.1		8.6	8.3					7
	Bandung	16.3	7.6		11.8	14.3	17.1			9.6						6
	Surabaya	13.1			17.3	13.8	18.1			11.7						5
	Makasar				39.7	38.0	19.2	6.5	13.2	11.8	5.2					7
	Indonesia	10.5	5.2		12.0	25.3	21.0	6.5	6.1							7
Frek insiden 2000 - 2007	Medan	2	2	2	3	3	1	1	2	2	2	2	2	4	4	28
	Jakarta	3	2	0	2	3	1	2	2	1	2	2	2	2	3	20
	Bandung	2	2	0	2	2	1	0	2	2	2	2	2	2	3	20
	Surabaya	2	1	0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	2	2	20
	Makasar	2	1	0	1	1	2	2	2	1	1	4	3	2	2	20
Indonesia	2	1	0	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	16	

Sumber : Badan Litbang Departemen Perdagangan (2008)



Gambar 5
Insiden Kenaikan Harga Bulanan Eceran Minyak Goreng di atas 5 Persen dengan
Acuan Rata-rata Bergerak 3 Bulan Sebelumnya

Ternyata ada sedikit perbedaan untuk unit observasi mingguan jika dibandingkan dengan unit observasi bulanan. Tabel 4 menyajikan ringkasan tentang insiden kenaikan harga menurut kategori, sedangkan Tabel 5 menyajikan informasi tentang waktu terjadinya insiden kenaikan harga yang dimaksud pada Tabel 4.

Dari Tabel tersebut dapat disimak bahwa untuk kategori kenaikan di atas 5 persen terjadi di semua kota. Frekuensi tersering memang terjadi untuk kategori kenaikan 5 – 15 persen. Meskipun demikian, frekuensi kenaikan 15 persen ke atas juga cukup sering terjadi, bahkan di Makasar selama periode Januari 2006 – Agustus 2008 terjadi 15 kali kenaikan harga di atas 25 persen.

Kenaikan harga rata-rata mingguan 5 % ke atas (relatif terhadap rata-rata tiga bulan sebelumnya) mulai terjadi sejak minggu pertama Agustus 2006. Setelah itu kenaikan sangat sering terjadi, terutama di kota-kota besar di luar Jakarta. Pada

tahun 2006 (Agustus – Desember), di Jakarta hanya terjadi pada minggu keempat Agustus dan selama Bulan Desember.

Pada Tahun 2007, kenaikan harga di atas 5 persen sangat sering terjadi dan hampir di semua kota besar yang diamati. Selama Januari – Desember 2007, hanya pada Bulan Maret kenaikan harga di bawah 5 persen.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa dari 7 variabel penjelas yang diduga mempengaruhi harga minyak goreng, terdapat 5 variabel yang signifikan. Kelima variabel tersebut adalah harga CPO di pasar internasional (dalam US \$), nilai tukar, pungutan ekspor, krisis pangan (variabel *dummy*), dan harga minyak goreng bulan sebelumnya. Harga BBM dan pola panen tidak berpengaruh signifikan. Koefisien determinasinya 0.98. Dengan demikian variasi variabel penjelas yang dimasukkan dalam model mampu menerangkan variasi harga minyak goreng.

Tabel 4
Frekuensi insiden kenaikan harga mingguan minyak goreng di beberapa kota besar pada periode Januari 2006 – Agustus 2008.

Kategori kenaikan*	Jakarta	Bandung	Surabaya	Medan	Makasar	Indonesia
5.0 - 9.9 %	17	18	20	18	12	17
10.0 - 14.9 %	15	19	16	18	9	9
15.0 - 19.9 %	5	6	8	7	3	8
20.0 - 24.9 %	2	2	1	2	5	2
>= 25.0 %	1	2	2	1	15	2
Total	40	47	47	46	44	38

*) relatif terhadap rata-rata tiga bulan sebelumnya,

Sumber : Badan Litbang, Departemen Perdagangan (2008)

Tabel 5
Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Minyak Goreng

	Coefficient	t-Statistic
Harga BBM	0.004277	0.203168
Nilai tukar	0.089875	3.074421
Pola panen	1.205226	0.104793
Pungutan ekspor	-21.31137	-1.501417
Harga CPO dunia	3.405029	6.682577
Krisis pangan (dummy variable)	186.8187	2.010253
Harga minyak goreng periode sebelumnya	0.625264	10.89698
Konstanta	-359.9110	-1.176196

R-squared	0.985700	Mean dependent var	5134.469
Adjusted R-squared	0.984549	S.D. dependent var	1362.366
S.E. of regression	169.3431	Akaike info criterion	13.18218
Sum squared resid	2494905	Schwarz criterion	13.39725
Log likelihood	-618.1537	F-statistic	856.6970
Durbin-Watson stat	1.827586	Prob(F-statistic)	0.000000

Bahan baku pembuatan minyak goreng (dalam penelitian ini dibatasi minyak goreng dari kelapa sawit karena pangsanya dalam pasar minyak goreng domestik lebih dari 80 persen) adalah CPO. Sementara itu, orientasi pasar produsen dalam memproduksi CPO adalah pasar ekspor. Oleh karena itu logis jika harga CPO di pasar internasional berpengaruh signifikan (positif) terhadap harga minyak goreng domestik. Semakin tinggi harga CPO di pasar internasional, semakin tinggi pula harga minyak goreng di pasar eceran domestik.

Nilai tukar (Rupiah per US \$) juga berpengaruh positif. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai tukar US \$ terhadap Rupiah (depresiasi) mendorong produsen CPO untuk mengeksport lebih banyak.

Akibatnya, pasokan CPO untuk produksi minyak goreng berkurang → terjadi kelebihan permintaan bahan baku untuk industri minyak goreng → harga CPO domestik naik → Model yang dipergunakan untuk biaya pokok industri minyak goreng meningkat → harga minyak goreng meningkat.

Pungutan ekspor CPO berpengaruh negatif terhadap harga minyak goreng. Meningkatnya pungutan ekspor mendorong eksportir minyak goreng untuk meningkatkan volume penyaluran CPO ke pasar domestik sehingga pada gilirannya menyebabkan terjadinya penurunan harga eceran minyak goreng di pasar domestik. Tanda koefisien parameter variabel 'dummy' krisis pangan adalah (+) dan ini menunjukkan bahwa krisis pangan juga

berkontribusi terhadap kenaikan harga minyak goreng. Ini logis dan mudah dipahami : meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat krisis pangan mendorong pula terjadinya kenaikan harga minyak goreng.

Temuan yang barangkali agak mengejutkan adalah bahwa harga BBM tidak berpengaruh signifikan terhadap harga minyak goreng. Fenomena ini diduga terkait dengan: (i) dalam struktur biaya minyak goreng, pangsa pengeluaran untuk BBM relatif kecil (hanya sekitar 4 persen), dan (ii) minyak goreng tidak makan tempat (*bulky*) dan daya simpannya jauh lebih lama daripada beras.

Hasil estimasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi instabilitas harga minyak goreng tertera pada Tabel 6.

Koefisien determinasi dari model regresi yang diterapkan pada minyak goreng hanya 0.32. Ini menunjukkan bahwa variasi variabel penjelas yang dimasukkan dalam model hanya mampu menerangkan sekitar 32 persen variasi instabilitas harga minyak goreng. Dengan kata lain, sebagian besar variabel yang bekerja di balik instabilitas harga minyak goreng memang belum teridentifikasi. Diduga variabel-variabel tersebut berkenaan dengan fenomena spekulasi dan kaitannya dengan situasi sosial politik yang memang sangat sulit dikuantifikasi dan digali datanya.

Dari Tabel 6 terlihat bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap instabilitas harga minyak goreng adalah instabilitas harga BBM, krisis pangan, instabilitas harga CPO di pasar internasional dan nilai tukar. Kesemuanya

Tabel 6
Estimasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Instabilitas Harga Minyak Goreng

	Coefficient	t-Statistic
Instabilitas harga BBM	0.057**	2.322
Instabilitas harga CPO	-0.004	-0.843
Instabilitas pola panen	-0.005	-0.360
Krisis pangan (dummy variable)	0.026**	2.022
Instabilitas pungutan ekspor	-0.002	-0.148
Instabilitas harga CPO dan nilai tukar	0.293**	4.070
Instabilitas harga minyak goreng periode sebelumnya	0.107	1.102
Konstanta	-0.001	-0.112

R-squared	0.320535	Mean dependent var	0.009939
Adjusted R-squared	0.265230	S.D. dependent var	0.045110
S.E. of regression	0.038668	Akaike info criterion	-3.586353
Sum squared resid	0.128587	Schwarz criterion	-3.369903
Log likelihood	176.5586	F-statistic	5.795743
Durbin-Watson stat	2.361348	Prob(F-statistic)	0.000016

bertanda positif yang berarti bahwa instabilitas yang terjadi pada variabel-variabel tersebut menyebabkan harga minyak goreng juga tidak stabil.

Sebagian besar variabel penjelas yang berpengaruh nyata terhadap instabilitas minyak goreng ternyata justru bukan variabel kebijakan. Sebagai contoh, instabilitas harga CPO dan nilai tukar. Perilaku kedua variabel ini ditentukan oleh mekanisme pasar internasional dan dengan sendirinya kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi sangatlah terbatas. Di sisi lain, pengaruh instabilitas pungutan ekspor yang secara teoritis merupakan instrumen kebijakan yang dapat dimainkan, namun ternyata pengaruhnya terhadap instabilitas harga tidak stabil. Fenomena serupa terjadi pula pada variabel harga BBM.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen kebijakan yang dapat dimainkan untuk mengatasi instabilitas harga minyak goreng dapat dikatakan sangat terbatas. Pungutan ekspor CPO, yang selama ini dipergunakan sebagai instrumen kebijakan pada dasarnya hanya efektif untuk menekan kecenderungan naiknya harga minyak goreng tetapi kurang efektif jika orientasinya adalah untuk stabilisasi harga.

Dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari masing-masing pilihan kebijakan, maka tampaknya

kebijakan yang diperlukan adalah kombinasi dua kebijakan. Dua kebijakan tersebut adalah (i) kebijakan yang berkaitan langsung dengan produsen dan perdagangan internasional dan (ii) kebijakan yang berkaitan dengan konsumen. Bukti empiris menunjukkan bahwa satu kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang kompleks seperti stabilisasi harga umum tidak efektif. Selanjutnya, kebijakan yang akan diambil perlu spesifik untuk masing-masing target (*decoupled policies*). Di negara maju seperti Amerika Serikat, kebijakan yang bersifat *decoupled* sudah banyak diterapkan terutama kebijakan produksi dan perdagangan dipisahkan dengan kebijakan distribusi, khususnya yang berkaitan dengan kelompok miskin. Dengan kebijakan yang bersifat *decoupled*, dampak ikutan atau eksek dari kebijakan tersebut lebih mudah diisolasi.

Jika pendekatan *decoupled* disepakati, paket kebijakan yang diperlukan adalah kebijakan yang bersifat efektif, jangka panjang dan *predictable*. Untuk itu, kebijakan yang diusulkan adalah ***kombinasi kebijakan Pungutan Ekspor dan subsidi ke penduduk miskin***. Pada saat ini pemerintah sebenarnya sudah menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut; namun pemerintah cenderung menerapkan semua pilihan kebijakan tersebut dan ada keraguan dalam implementasinya. Pemerintah disarankan hanya berkonsentrasi untuk menerapkan kedua kebijakan tersebut.

Kebijakan PE lebih dimaksudkan untuk azas keadilan atau pembagian beban yang lebih adil, baik ketika harga tinggi maupun rendah. Walaupun bukan merupakan kebijakan yang efektif untuk membendung ekspor ketika harga tinggi, pemerintah minimal mudah melaksanakan kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah setidaknya mendapat penerimaan yang salah satunya dapat digunakan untuk melakukan kebijakan kompensasi, terutama pada masyarakat miskin yang sangat rentan terhadap kenaikan harga tersebut. Selanjutnya, untuk mengurangi beban yang bagi orang miskin sebagai akibat PE tidak sepenuhnya mengendalikan harga, khususnya ketika harga meningkat, pemerintah dapat menerapkan kebijakan kompensasi untuk mereka.

Dengan pertimbangan bahwa PE tidak efektif mengendalikan instabilitas harga, maka orang miskin sebagai konsumen yang paling rentan terhadap kenaikan harga perlu dilindungi dengan kebijakan khusus yang efek distorsi terhadap pasar paling minimal. Salah satu kebijakan yang cukup efektif adalah dengan mengadopsi kebijakan *ration card* di India atau *food stamp* di Amerika Serikat. Kebijakan sejenis *ration card* ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, data orang miskin yang tepat, serta manajemen distribusi yang handal. Akan tetapi, jika pemerintah bermaksud menyelesaikan masalah subsidi untuk orang miskin, termasuk subsidi untuk minyak goreng secara mendasar, hal ini

seyogyanya dilakukan. Subsidi akan semakin menurun ketika harga makin menurun. Kebijakan ini akan bersifat jangka panjang, karena akan terhindar dari isu-isu konflik kepentingan antara *stakeholder* yang bersifat jangka pendek.

E. KESIMPULAN

Selama tahun 2000-2007 kondisi yang paling tidak stabil di tahun 2007 dan 2001 karena terkait dengan kenaikan harga BBM dan fluktuasi harga CPO di pasar internasional. Kondisi ini terjadi di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Secara keseluruhan stabilitas harga eceran minyak goreng dalam dua tahun terakhir cenderung mengalami penurunan.

Instabilitas tertinggi terjadi di Medan (indeks stabilitas = 15,2). Meskipun demikian rata-rata harga tahunannya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan empat kota besar lainnya. Harga paling stabil adalah di Bandung (indeks stabilitas = 12,2), meskipun secara rata-rata harga tahunannya lebih tinggi daripada di Medan..

Dalam periode Januari 2000 – Desember 2007, untuk rata-rata Indonesia telah terjadi 16 kali insiden kenaikan harga di atas 5 persen. Frekuensi tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu 7 kali, dan peringkat berikutnya adalah pada tahun 2006 dan 2003 (masing-masing 3 kali). Fenomenanya memang berbeda jika

sumber-sumber keragamannya diperkecil dengan cara mempersempit cakupan wilayah kajian dengan memperlakukan kota sebagai unit analisis. Ternyata insiden lonjakan harga di atas 5 persen masing-masing kota tersebut lebih sering terjadi daripada di level agregat nasional.

Dalam kurun waktu Januari 2000 – Desember 2007, kenaikan harga eceran bulanan minyak goreng dengan besaran 5 persen ke atas (dibandingkan rata-rata tiga bulan sebelumnya) di Kota Medan terjadi 28 kali, sedangkan di Jakarta 24 kali. Di tiga kota lainnya (Bandung, Surabaya, dan Makassar) masing-masing adalah 20 kali. Meskipun dari sudut pandang frekuensi kejadiannya yang tertinggi adalah di Makassar namun jika ditinjau dari tingkat kenaikannya, rekor tertinggi justru terjadi di Makassar yaitu 39 persen. Ini terjadi pada bulan April 2007. Meskipun dengan persentase yang lebih rendah, kenaikan harga tersebut masih terus terjadi sampai dua bulan berikutnya (Mei dan Juni). Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa stabilitas harga eceran minyak goreng dalam dua tahun terakhir menunjukkan tendensi menurun. Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, di antara lima kota besar yang menjadi sampel penelitian kota yang sebaiknya menjadi fokus kebijakan adalah Medan, Jakarta, dan Makassar.

Hasil estimasi menunjukkan terdapat 5 variabel yang signifikan mempengaruhi harga minyak goreng:

harga CPO di pasar internasional (dalam US Dollar), nilai tukar, pungutan ekspor, krisis pangan (variabel dummy) dan harga minyak goreng bulan sebelumnya. Temuan yang mengejutkan adalah harga BBM tidak signifikan mempengaruhi harga minyak goreng. Diduga hal ini terkait dengan pangsa pengeluaran BBM relatif kecil dalam struktur biaya minyak goreng dan daya simpannya jauh lebih lama.

Sebagian besar variabel yang bekerja di balik instabilitas harga minyak goreng memang belum teridentifikasi karena adanya fenomena spekulasi dan situasi sosial politik yang memang sangat sulit untuk dikuantifikasi dan digali datanya. Variabel yang berpengaruh nyata terhadap instabilitas harga minyak goreng adalah: instabilitas harga BBM, krisis pangan, instabilitas harga CPO di pasar internasional dan nilai tukar. Sebagian besar variabel yang signifikan mempengaruhi instabilitas harga minyak goreng ternyata justru bukan variabel kebijakan sehingga dengan sendirinya kemampuan pemerintah untuk intervensi sangat terbatas. Pungutan ekspor CPO sebagai instrumen kebijakan ternyata hanya efektif untuk mengontrol kecenderungan naiknya harga minyak goreng tapi kurang efektif untuk kepentingan stabilisasi harga.

Dengan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari masing-masing pilihan kebijakan, maka tampaknya kebijakan yang diperlukan

adalah kebijakan yang bersifat efektif, jangka panjang dan *predictable*. Untuk itu, kebijakan yang diusulkan adalah ***kombinasi kebijakan Pungutan Ekspor dan subsidi ke penduduk miskin.***

Walaupun bukan merupakan kebijakan yang efektif untuk membendung ekspor ketika harga tinggi, pemerintah minimal mudah melaksanakan kebijakan tersebut. Di samping itu, pemerintah mendapat penerimaan yang salah satunya dapat digunakan untuk melakukan kebijakan kompensasi, terutama pada masyarakat miskin yang sangat rentan terhadap kenaikan harga tersebut.

Kebijakan kompensasi yang tampaknya cukup efektif adalah kebijakan *ration card* di India atau *food stamp* di Amerika Serikat. Walaupun kebijakan seperti ini tentu membutuhkan dana yang cukup besar, data orang miskin yang tepat, serta manajemen distribusi yang handal, pemerintah perlu melakukannya bila memang berniat serius menyelesaikan masalah subsidi minyak goreng untuk orang miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, B. (2007), "Buah Simalakama Penanganan Minyak Goreng", *Media Indonesia*, Senin, 11 Juni 2007.

CIC. (2007), "Perkembangan dan Prospek Industri Kelapa Sawit di Indonesia", *Profil Bisnis*, CIC No. 390, Jakarta.

Dradjat, B. (2007), *Gejolak Harga Minyak Goreng: Perlukah Intervensi Pemerintah*, Lembaga Riset Perkebunan Indonesia, Bogor.

FAO. (1986), *Rice Development Policy: an analysis of the options for meeting future consumption requirements in Papua New Guinea, in cooperation with the Papua New Guinea Department of Primary Industry*, Port Moresby.

Janvry, Sadoulet Van. (1995), *Quantitative Development Policy Analysis*, Johns Hopkins Univ. Press: Baltimor and London.

Jayne, Thomas S. (2004). *Food Marketing and Price Stabilization Policies in Eastern and Southern Africa: A Review of Experience and Lessons Learned*, World Bank Conference, Washington D.C.

Jordan, H., Grove, B., Jooste, A., dan Alemu, Z.G. (2007). *Measuring the Price Volatility of Certain Field Crops in South Africa Using the ARCH/GARCH Approach*, *Agrekon*, 46(3), 306-322.

LMC. (2003), *LMC International Documents Wide Range of Subsidies Among World's Major Sugar Countries*, American Sugar Alliance, Arlington.

Myers, Robert J. (2006), "On the costs of food price fluctuations in low-income countries, Managing Food Price Risks and Instability in a Liberalizing Market Environment", Volume 31, Issue 4, August 2006, P. 288-301.

- Newbery dan Stiglitz. (1981), *The Theory of Commodity Price Stabilization : A Study in Economics of Risk*, Oxford University Press, Oxford.
- Pursell, G. and A. Gupta. (1997), *Trade Policies and Incentives in Indian Agriculture*, Development Research Group, the World Bank, New Delhi.
- Rahayuningrum, N. dan Lubis, A. (2006), "Kajian Kebijakan Gula: Tataniaga Gula dan Harga Eceran", Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan, Departemen Perdagangan, Jakarta.
- Sawit, Husein. (2007), "Stabilisasi Harga Beras: Penentuan Harga Referensi OP dan Intervensi Pemerintah", *Majalah Pangan*, no.49/XVI/Juli 2007.
- Susila, W. R. (2004), Impacts of CPO-Export on Several Aspects of Indonesian CPO Industry", *Oil Palm Industry Economic Journal*, 4(2), 1- 13.
- Susila, W. R. (Juli 16, 2007), *Analisis Kebijakan Perdagangan CPO dan Minyak Goreng*, Ipard.com (Online). http://www.ipard.com/art_perkebun/Jul16-07_wr.asp
- Susila, W. R. (2007), *Merevitalisasi Kebijakan Pangan Indonesia*, ITAP Working Paper, ITAP-USAID, Jakarta.
- Timmer, P.C. (2003), *Agriculture and Economic Development*, Published Paper no.1, Indonesian Food Policy Program.
- World Bank. (2007), *Issues in Indonesian Rice Policy*, draft March 2007.